



RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Kasih-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang tertib dan akuntabel.

Rencana Strategis ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029. Dengan adanya Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 ini, diharapkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat terlaksana secara terencana, terukur, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah guna mendukung terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029.

Sanggau, 2 Agustus 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau,



Silvestra Dayana Simbolon, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19671126 199503 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU	11
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	11
2.1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	11
2.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	12
2.1.3 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	18
2.1.4 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sanggau	21
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	27
2.1.6 Mitra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	28
2.1.7 Kerjasama Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	29

2.2.1	Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	29
2.2.2	Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN		45
3.1	Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	45
3.2	Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	45
3.3	Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	49
3.4	Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA		
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		54
4.1	Uraian Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	54
4.2	Uraian Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	54
4.3	Uraian SubKegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	55
4.4	Uraian SubKegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	85
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	87
BAB V PENUTUP		106
5.1	Kesimpulan	106
5.2	Kaidah Pelaksanaan	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Berdasarkan Golongan Tahun 2025	18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Berdasarkan Golongan Tahun 2025	19
Tabel 2.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	19
Tabel 2.4	Daftar Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau (Per Desember 2024)	20
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau 2020-2024	22
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024	26
Tabel 2.7	Analisis SWOT	31
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	33
Tabel 2.9	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	44
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	47
Tabel 3.2	Penetapan Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026-2030	51
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	53
Tabel 4.1	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	57
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	65

Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	83
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030	86
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030	88
Tabel 4.6	Indikator, Target Dan Rencana Pendanaan Program / Kegiatan / Subkegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 – 2030	90

DAFTAR GAMBAR

Gambae 1.1	Keterkaitan Rencana Strategis BPKAD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan baik perencanaan pembangunan jangka Panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Pada setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan lima tahun Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan kebijakan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau mempertimbangkan kesesuaian dan keselarasan antar dokumen perencanaan serta senantiasa

mempertimbangkan dinamika yang terjadi dilingkungan internal maupun eksternal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

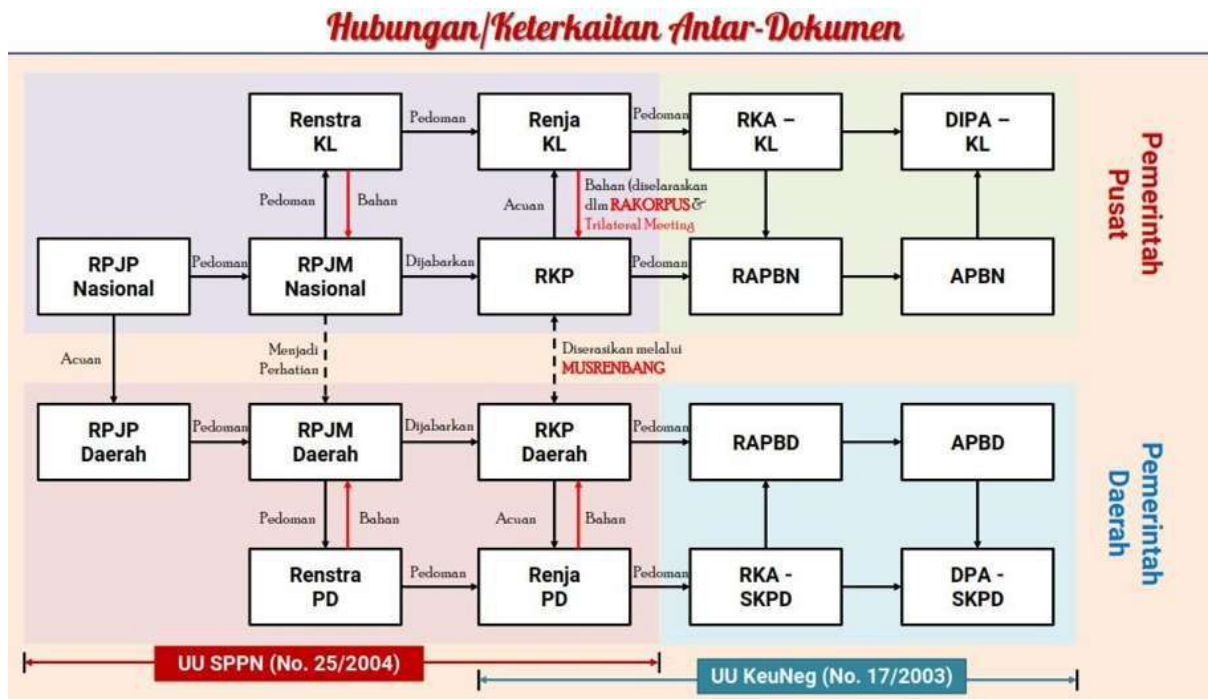
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Sanggau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau nomor 20 Tahun 2021 merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (Lima) Tahun yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 memperhatikan keterkaitan antar kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Keterkaitan serta tahapan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam program tahunan dan menjadi acuan serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Rencana Strategis Badan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau disusun berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis;
2. Penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis;
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis;
5. Penetapan Rencana Strategis;

Adapun Hubungan/ keterkaitan antara Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dengan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Strategis BPKAD
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan bagan di atas dokumen Rencana Strategis merupakan penjabaran Rancangan Akhir RPJMD terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah tahun 2025-2029. Jika terdapat penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika Pembangunan yang belum diakomodir dalam dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJM Dan Strategis PD Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014–2034; dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai pedoman kinerja penyelenggaraan bidang urusan keuangan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Strategis ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 yang disertai Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagai dasar pengendalian dan evaluasi. Rencana strategis menjadi dokumen yang memastikan program yang dijalankan memiliki

keterpaduan dan kesinambungan antara periode sebelumnya dan periode mendatang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam merencanakan pembangunan pada kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.
2. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di bidang urusan keuangan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.
3. Menjadi pedoman/ acuan kerja resmi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
4. Menjadi instrumen tolak ukur kinerja untuk memudahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

- 2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
 - 2.1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
 - 2.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
 - 2.1.3 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
 - 2.1.4 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
 - 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
 - 2.1.6 Mitra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
 - 2.1.7 Kerjasama Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
 - 2.2.2 Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
- 4.2 Uraian Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
- 4.3 Uraian SubKegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
- 4.4 Uraian SubKegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

2.1.1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Sanggau nomor 20 tahun 2021 perubahan atas peraturan Bupati nomor 58 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah;
5. Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat

Sekretariat, membawahi 2 (Dua) Sub Bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja

3. Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan, membawahi 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Anggaran
- b. Sub Bidang Perbendaharaan

4. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah
- b. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

5. Bidang Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
- b. Sub Bidang Pengamanan Dan Pengendalian Aset

6. Unit Pelaksana Teknis Badan
7. Jabatan Fungsional

2.1.2. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan Atas

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang subbidang pembiayaan dan aset. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Badan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Badan
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di lingkungan Badan;
- c. Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Badan;
- d. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pembiayaan, akuntansi, dan aset daerah;

- e. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembiayaan, akuntansi dan aset daerah;
- f. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- h. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
- i. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- j. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

3. Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pembiayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;

- e. Pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Pembiayaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang akuntansi penerimaan daerah dan ekuntansi keuangan pemerintah daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang akuntansi penerimaan daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Akuntansi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang aset daerah. Dalam melaksnaakan tugasnya, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan,dan pengadaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan pengadaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan pengadaan aset daerah, penatusahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang perencanaan dan pengadaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- e. Pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Aset Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis bertugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

Adapun bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 dapat di lihat sebagai berikut:

Gambar 2.1

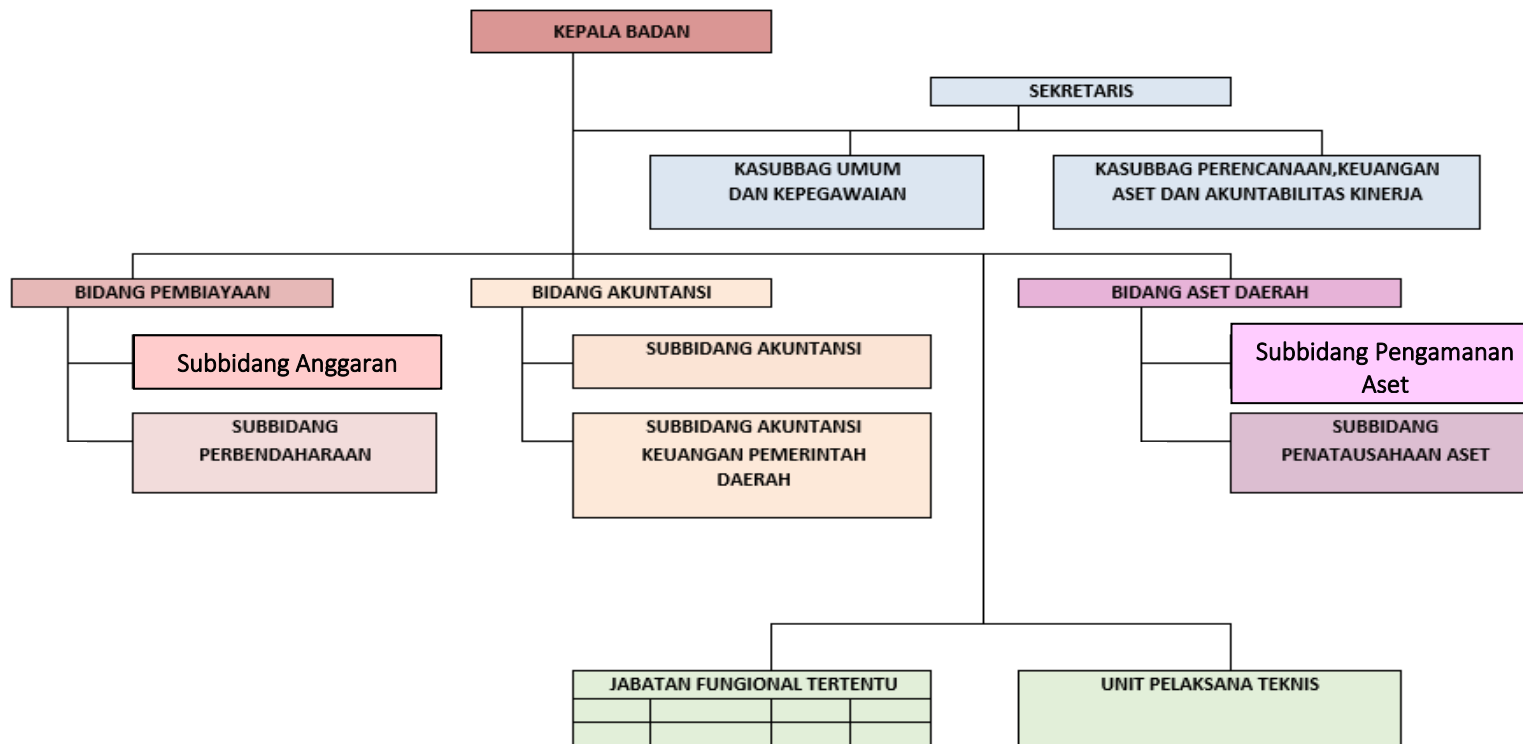
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR :
TENTANG :

20 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU



2.1.3. Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sanggau

a. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia menurut golongan, tingkat pendidikan, jabatan struktural/ eselon serta keikutsertaan pegawai dalam diklat yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

- a) Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau berjumlah sebanyak 60 orang terdiri dari:
- 1 Kepala Badan
 - 1 Sekretaris
 - 3 Kepala Bidang
 - 2 Kepala Sub Bagian
 - 6 Kepala Sub Bidang
 - 47 Staf

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	Gol I	GOL II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	2 Orang	27 Orang	5 Orang	34 Orang
	TOTAL	-	2 Orang	27 Orang	5 Orang	34 Orang

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian, Tahun 2025

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	Gol V	GOL VI	Gol VII	Gol IX	Jumlah
1	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	16 Orang	2 Orang	-	8 Orang	26 Orang
	TOTAL	16 Orang	2 Orang	-	8 Orang	26 Orang

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian, Tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	D1/II	DIII	DIV	S1	S2	Jumlah
1	Laki-Laki	-	-	11	-	3	-	13	4	31
2	Perempuan	-	-	13	-	3	-	10	3	29
	TOTAL	-	-	24	-	6	-	23	7	60

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian, Tahun 2025

- b) Dilihat dari segi keikutsertaan pegawai dalam diklat, terdiri dari:
 - DIKLAT PIM Tk. III sebanyak 1 orang
 - SEPADA sebanyak 0 orang,
 - ADUM sebanyak 1 orang,
 - DIKLATPIM Tk. IV sebanyak 4 orang.
- c) Dilihat dari segi Jabatan Struktural / Eselon terdiri dari:
 - Eselon IIb 1 orang,
 - Eselon IIIa 1 orang,
 - Eselon IIIb 4 orang,
 - Eselon IVa 6 orang.

b. Saran dan Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana saat ini sudah cukup memadai, akan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi baik jumlah maupun kapasitasnya guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sanggau.

Adapun kondisi Sarana dan Prasarana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau guna menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan saat ini dalam kondisi baik, secara rinci terlihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau (Per Desember 2024)

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	AC	39	Baik	
2	Bel Tamu	1	Baik	
3	Blower	8	Baik	
4	Brankas	6	Baik	
5	Ceret	7	Baik	
6	CPU	17	Baik	
7	Dispenser	9	Baik	
8	Exhaust fan	5	Baik	
9	Filling Kabinet	18	Baik	
10	Foto	24	Baik	
11	Galon	14	Baik	
12	Piring + Gelas	238	Baik	
13	Horden	3	Baik	
14	Infokus	1	Baik	
15	Jam Dinding	13	Baik	
16	Karpet	2	Baik	
17	Kipas Angin	3	Baik	
18	Kompor Gas	3	Baik	
19	Komputer	42	Baik	
20	Kulkas	7	Baik	
21	Kursi	142	Baik	
22	Layar Infokus + Layar CCTV	2	Baik	
23	Lemari	32	2 Kurang Baik	
24	Magic com	3	Baik	

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
25	Meja Kerja + Meja Rapat	104	1 Kurang Baik	
26	Mesin	22	3 Rusak Berat	
27	Monitor	23	Baik	
28	PC All in One	5	Baik	
29	Pengharum Ruangan	2	Baik	
30	Piagam + Plat Garuda	2	Baik	
31	Printer	60	Baik	
32	Rak Arsip	29	Baik	
33	Resiver	6	Baik	
34	Scanner	1	Baik	
35	Server (SIMAKDA, SIMBADA, SIMDA)	4	Baik	
36	Sound System, Speaker, Stabilizer	4	Baik	
37	Taplak Meja	4	Baik	
38	Televisi	12	Baik	
39	Tong Sampah	16	Baik	
40	UPS	40	Baik	
41	Wireless Router	6	Baik	

2.1.4. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Sebagai salah satu perangkat daerah yang diberi wewenang dan tanggungjawab pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sesuai tugas dan fungsinya Badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dari keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan, kinerja pelayanan periode 2020-2024 seperti terlihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyusunan APBD tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah penerbitan SPD tepat waktu	4.725	4.950	4.950	4.950	4.950	4.479	4.950	4.950	4.950	4.950	0,95	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	10.300	11.185	11.185	11.185	11.185	10.294	11.185	11.185	11.185	11.185	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Prosentase realisasi transfer pemerintah pusat	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	1,05	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Prosentase realisasi transfer pemerintah provinsi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1,11	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Prosentase penyerapan belanja daerah	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	83,98	95,00	95,00	95,00	95,00	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Prosentase SKPD yang menyampaikan SPJ penerimaan tepat waktu	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1,11	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Prosentase aset daerah yang telah terinventarisir dengan baik	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,95	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Prosentase aset daerah yang memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	99,00	83,00	83,00	83,00	83,00	1,19	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Prosentase kenaikan nilai aset daerah tahun 2020/2021/2022/2023/2024	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKBMD tepat waktu	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan daftar kebutuhan pemeliharaan barang (DKPBMD) tepat waktu	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
15	Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan inventaris BMD tepat waktu	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,94	100,00	100,00	100,00	100,00

Analisis Pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode perencanaan sebelumnya adalah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan perangkat daerah. Anggaran dan realisasi belanja pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Persentase Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	25.419.896.273,00	16.965.773.902,00	18.657.985.843,00	20.869.157.610,00	16.488.255.541,50	21.981.410.955,00	13.147.789.596,00	16.496.511.792,40	14.000.318.568,00	14.876.025.056,00	86,47	77,50	88,42	67,09	90,22	-9	-2,62
BELANJA OPERASI	25.142.685.273,00	16.248.441.902,00	18.274.611.752,00	20.431.295.584,00	15.626.648.107,50	21.704.849.955,00	12.567.524.632,00	16.116.009.722,40	13.568.071.568,00	14.116.265.056,00	86,33	77,35	88,19	66,41	90,33	-9,94	-9,72
Belanja Pegawai	7.114.740.903,00	5.263.627.803,00	5.435.743.071,00	10.022.137.503,00	4.876.847.079,00	5.285.552.356,00	3.993.456.197,00	4.093.145.515,00	3.791.526.904,00	4.218.558.646,00	74,29	75,87	75,30	37,83	86,50	-6,84	-4,99
Belanja Barang dan Jasa	18.027.944.370,00	10.984.814.099,00	12.838.868.681,00	10.409.158.081,00	10.749.801.028,50	16.419.297.599,00	8.574.068.435,00	12.022.864.207,40	9.776.544.664,00	9.897.706.410,00	91,08	0	93,64	93,92	92,07	-11,55	-11,50
BELANJA MODAL	277.211.000,00	717.332.000,00	383.374.091,00	437.862.026,00	861.607.434,00	276.561.000,00	580.264.964,00	380.502.070,00	432.247.000,00	759.760.000,00	99,77	80,89	99,25	98,72	88,18	21,83	19,89
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.211.000,00	717.332.000,00	299.499.091,00	255.981.984,00	861.607.434,00	206.611.000,00	580.264.964,00	296.697.070,00	251.247.000,00	759.760.000,00	99,71	80,89	99,06	98,15	88,18	27,95	26,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	-	83.875.000,00	181.880.042,00	-	69.950.000,00	-	83.805.000,00	181.000.000,00	-	99,93	0	99,92	99,52	0,00	-20,85	-20,90

Dari tabel 2.6 dapat diketahui persentase serapan pendanaan BPKAD tahun 2020–2024 rata-rata diatas 70% dengan rata-rata penurunan anggaran pelayanan BPKAD sepanjang tahun 2020–2024 sebesar -9%. Persentase serapan rata-rata 70% menunjukan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya BPKAD telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Kelompok sasaran layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset. Adapun kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau berjumlah 42 perangkat daerah termasuk diantaranya 15 Kecamatan. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang kelompok sasaran layanan BPKAD:

1. Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau memberikan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah, termasuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait dengan urusan keuangan dan aset daerah.

2. Urusan Keuangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau memberikan dukungan dalam urusan di bidang keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pengelolaan Keuangan dan Aset

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan melayani kelompok sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam melakukan penyusunan anggaran daerah, pengelolaan perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan aset daerah dan pelaksanaan kegiatan pendanaan dan investasi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset

BPKAD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah

BPKAD juga berperan dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah.

3. Dukung Pembangunan Daerah

BPKAD memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1.6. Mitra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Selain kelompok sasaran, perangkat daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kabupaten Sanggau juga menjalin koordinasi dengan beberapa mitra perangkat daerah yang terdiri dari CSO/NGO/Private sektor/akademisi maupun lembaga pendukung pemerintah lainnya. Mitra perangkat daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah. Beberapa mitra BPKAD Kabupaten Sanggau sudah terafiliasi di dalam Sabang Merah Berdompu yang merupakan forum kolaborasi antar mitra pengelolaan dengan beberapa perangkat daerah dalam melakukan pencapaian perencanaan daerah. Beberapa mitra pengelolaan yang bekerjasama dengan BPKAD dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sanggau yaitu:

1. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), merupakan instansi vertikal dari Kementerian Keuangan yang berperan sebagai mitra strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengelola aset daerah.

2.1.7. Kerjasama Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. BPKAD Kabupaten Sanggau sudah menjalin kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (Bank KALBAR) yang ada di Kabupaten Sanggau. Bank Kalbar menjadi mitra keuangan BPKAD dalam penyaluran dan pengelolaan dana kas daerah serta pelayanan perbankan lainnya. Salah satu program kerjasama antara BPKAD dan Bank Kalbar adalah Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan daerah.

Selain itu BPKAD juga kerjasama dengan instansi pusat maupun daerah untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan aset, serta kerjasama dengan notaris atau BPN untuk proses sertifikasi aset demi keamanan dan kelancaran administrasinya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

2.2.1. Permasalahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel serta mengutamakan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat yang mengacu pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai payung atau acuan dalam perumusan program dan

kegiatan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan terjadi dengan kondisi sebenarnya yang terdapat di daerah tersebut. Permasalahan pembangunan pada umumnya disebabkan oleh faktor internal pelaksanaan pembangunan yang terjadi dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya pembangunan di suatu daerah. Permasalahan internal dapat terjadi antara lain karena tidak teroptimalkannya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya kelemahan yang membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam analisis internal ini diuraikan juga mengenai pengalaman akan permasalahan dan menjadi isu strategis sehingga dapat membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Kabupaten Sanggau.

Salah satu metode yang digunakan BPKAD Kabupaten Sanggau dalam melakukan analisis permasalahan baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi adalah menggunakan metode Analisa SWOT. Analisa SWOT dapat dimanfaatkan untuk memetaan isu atau kecenderungan, membangun ketertarikan antar isu, mengembangkan beberapa kemungkinan skenario masa depan yang mungkin terjadi dan membuat peta jalan berupa rumusan kebijakan, menata organisasi, memobilisasi sumber daya serta melakukan evaluasi pencapaiannya. Berikut adalah permasalahan BPKAD Kabupaten Sanggau berdasarkan urusan keuangan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan berkualitas yang diidentifikasi melalui analisis SWOT:

Tabel 2.7
Analisis SWOT

2.1.1 Kekuatan (Strengths) • Sumber Daya Manusia yang tersedia berdasarkan kebijakan klarifikasi pangkat, pendidikan dan pelatihan • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan Tupoksi dan kewenangan yang diberikan • Ketersediaan software Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai serta mendukung tugas pelayanan sehari-hari.	2.1.2 Kelemahan (Weaknesses) • Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berakibat pada perubahan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan dan aset daerah • Kebutuhan belanja daerah lebih besar dari kapasitas keuangan daerah dalam pendanaan program/ kegiatan pembangunan daerah • “Asset <i>idle</i>” (kekayaan/Aset daerah yang belum termanfaatkan) belum teridentifikasi secara jelas. • Ketergantungan terhadap dana pusat masih sangat kuat.
2.1.3 Peluang (Opportunities) • Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel • Kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan • Inventarisasi terhadap aset daerah yang masih bisa dioptimalkan • Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	2.1.4 Ancaman (Threats) • Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan • Masih adanya aset di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang belum dioptimalkan • Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset • Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset. • Tuntutan transparansi informasi publik menuju <i>good governance</i>. • Kualitas SDM pengelola keuangan dan aset yang belum optimal • Inventarisasi aset daerah yang belum maksimal

Berdasarkan hasil identifikasi masalah menggunakan Analisis SWOT serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan sesuai dengan kewenangan yang telah diamanahkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, teridentifikasi beberapa permasalahan baik dari lingkungan internal maupun eksternal dalam Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau. Dari hasil identifikasi masalah tersebut kemudian dilakukan penentuan prioritas masalah yang akan menjadi prioritas dan sasaran Pembangunan daerah. Berikut hasil pemetaan permasalahan BPKAD Kabupaten Sanggau yang dijabarkan pada table 2.8:

Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penatausahaan aset belum dilaksanakan secara tertib	Kurangnya kepedulian terhadap penatausahaan aset	• Penatausahaan aset dianggap kurang penting • Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan Pengguna Barang dan Pengurus Barang tentang pengelolaan aset • Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penatausahaan aset
		Pencatatan aset belum dilaksanakan secara baik	• Kurangnya ketersediaan dokumen pendukung • Keberadaan aset tidak jelas • Kurangnya pemahaman Pengurus Barang tentang pencatatan aset
2	Pemanfaatan aset belum maksimal	Persepsi yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset bagi pendapatan daerah	• Kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan aset daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah • Dokumen kepemilikan aset yang tidak lengkap • Belum tersedianya pejabat fungsional penilai barang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pengamanan dan pengendalian aset belum optimal	Adanya aset yang dikuasai oleh ASN yang purna tugas dan masyarakat karena pemberian sanksi kurang tegas	• Kurangnya SDM yang melakukan pengawasan di lapangan • Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pengamanan • Kurangnya dokumen Pendukung • Kurangnya pemahaman terhadap regulasi
4	Laporan Keuangan Perangkat Daerah belum tepat waktu	Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah	• Kualitas SDM Pejabat Penatausahaan Keuangan dan SDM Penatausahaan Aset pada Perangkat Daerah belum memadai • Adanya pergantian petugas akuntansi dan penyusun laporan keuangan karena promosi dan mutasi dimana penugasan ASN bukanlah wewenang dari BPKAD melainkan BKPSDM • Belum terintegrasinya Sistem Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mempengaruhi proses penyusunan Neraca Aset sehingga berdampak pada penyusunan Laporan Keuangan secara keseluruhan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Pelaporan Keuangan Daerah	Keterlambatan penyampaian informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Lainnya kepada entitas pengguna	• Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah • Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi yang menopang pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah • Belum adanya tenaga IT yang berlatar belakang pendidikan akuntansi di Bidang Akuntansi yang memahami secara detail aplikasi pengelolaan keuangan guna mendukung percepatan penyampaian informasi pelaporan keuangan daerah
6	Perencanaan anggaran perangkat daerah belum optimal	Sering terjadi kesalahan pemilihan kode rekening belanja	• Kurangnya pemahaman pejabat perencanaan pada perangkat daerah terkait pemilihan kode rekening yang tepat • Fungsi verifikasi dan koordinasi terkait perencanaan anggaran perangkat daerah belum berjalan optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah belum maksimal	Realisasi penyerapan anggaran dan pelaporan pada perangkat daerah belum optimal	• Kurangnya SDM yang memadai • Adanya penyesuaian kerja terhadap penggunaan aplikasi baru yang merupakan kebijakan pemerintah pusat • Kualifikasi pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran banyak yang belum memenuhi syarat • Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD berdasarkan tabel 2.8 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kepedulian terhadap penatausahaan aset
2. Pencatatan aset belum dilaksanakan secara baik
3. Persepsi yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset bagi pendapatan daerah
4. Adanya aset yang dikuasai oleh ASN yang purna tugas dan masyarakat karena pemberian sanksi kurang tegas
5. Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah
6. Keterlambatan penyampaian informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Lainnya kepada entitas pengguna
7. Sering terjadi kesalahan pemilihan kode rekening belanja.
8. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban bulanan skpd.

2.2.2. Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. BPKAD Kabupaten Sanggau diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Berikut beberapa hasil telaah isu strategis berdasarkan beberapa dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2025-2029.

a. **Telaahan Isu Strategis Berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029**

Dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) acuannya sudah jelas regulasinya yaitu dimulai dengan tahapan menyusun rancangan awal renstra, rancangan renstra dan rancangan akhir renstra. BPKAD Kabupaten Sanggau sebagai salah satu perangkat daerah yang menyiapkan dokumen perencanaan tentunya dalam proses penyusunannya berpedoman dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Regulasi juga mengamanatkan dengan jelas bahwa dalam dokumen rencana strategis haruslah memperhatikan visi dan misi kepala daerah yang akan disinkronkan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang berisikan tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum dan program perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan peluang yang dimiliki Kabupaten Sanggau, nilai-nilai daerah, aspirasi dan dinamika yang berkembang, maka Visi Kabupaten Sanggau untuk periode 2025-2029 adalah:

“SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN”

Makna dari visi **“Maju Berkelanjutan”** menunjukkan keadaan semakin meningkatnya berbagai indikator pembangunan daerah yang telah dicapai pada periode pemerintahan yang sebelumnya. Beberapa indikator pembangunan daerah yang menjadi fokus pada masa RPJMD tahun 2025-2029 meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik secara berkesinambungan.

Makna **“Berkeadilan”** menunjukkan keadaan pembangunan yang merata antar wilayah dengan perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang. Kabupaten Sanggau memiliki ciri khas latar belakang budaya yang beragam karena memiliki penduduk dari berbagai jenis suku dan agama. Oleh karena itu pembangunan daerah yang dilaksanakan akan memberikan aspek keadilan bagi setiap suku dan budaya yang ada di Kabupaten Sanggau.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 tersebut didukung oleh 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Sanggau yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2025 Tahun 2025-2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar di perdesaan, perkotaan dan perbatasan negara;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul;
4. Melestarikan adat budaya dan lingkungan hidup yang bermartabat;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan aparatur sipil negara yang profesional; dan
6. Meningkatkan harmonisasi dan toleransi antar umat beragama.

Memperhatikan sasaran strategis daerah yang menjadi tugas utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang harus dicapai adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator daerah (indikator tujuan dan sasaran) opini BPK terhadap laporan keuangan”. Beberapa upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan sasaran strategis daerah yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Integrasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang lebih berorientasi kinerja dan pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil.
3. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan peningkatan efektifitas penerapan SAKIP khususnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan Integrasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang lebih berorientasi kinerja dan pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil.
4. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan peningkatan efektifitas penerapan SAKIP khususnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan dokumen RPJMD Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMN 2025-2029 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Karena itu, pemerintah daerah Provinsi dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 perlu mencermati dan memperhatikan Renstra K/L Tahun 2025-2029, sehingga Renstra 2025-2029 yang disusun menggambarkan arah kebijakan nasional. Hal ini dilakukan untuk menjamin terformulasikannya kebijakan pemerintah daerah Provinsi yang responsif terhadap arah pembangunan nasional. Dalam hal ini, Renstra Provinsi Tahun 2025-2029 selain untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah Provinsi juga untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan nasional. Keterkaitan dan keselarasan antara dokumen Renstra Provinsi Tahun 2025-2029 dan dokumen Renstra K/L tahun 2025-2029 merupakan konsekuensi langsung dari penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sanggau merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah Kabupaten Sanggau harus bersinergi. Untuk itu, untuk mewujudkan sinergitas tersebut, pemerintah Kabupaten Sanggau tetap mengacu pada misi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025- 2045.

Visi RPJPD Kabupaten Sanggau 2025-2045 adalah “SANGGAU PERMAI, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”, dengan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing visi sebagai berikut:

1. Kabupaten Sanggau yang Permai adalah impian masa depan masyarakat Kabupaten Sanggau sejak dahulu kala dengan mencerminkan kearifan lokal dan semangat berdompu tanpa memandang suku, agama, ras antar golongan sehingga menjadi cikal bakal lahirnya Kampung Sanggau Permai di wilayah utara Kota Sanggau. Kata permai selain akrab di telinga masyarakat Kabupaten Sanggau, juga merupakan interpretasi dari kata pantas, elok, ramah, manis, aman dan indah.
2. Kabupaten Sanggau Maju yaitu keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel berbasis elektronik.
3. Kabupaten Sanggau Sejahtera dengan memastikan masyarakat Kabupaten Sanggau sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, aman, sentosa dan makmur dengan memuliakan kaum perempuan, disabilitas dan lansia sehingga tidak ada kaum termarginalkan.
4. Kabupaten Sanggau Berkelanjutan diwujudkan dengan memastikan kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat demi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat

memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten yang terencana, tersusun dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Sanggau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034. Berdasarkan Perda tersebut, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang serta penetapan kawasan strategis kabupaten. Rencana struktur ruang saat ini masih terdapat kesamaan bahwa pola pembangunan berdasarkan pada Pusat Kegiatan Nasional dengan beberapa indikasi kegiatan seperti pola hunian, peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih, air limbah serta persampahan. Sedangkan pola struktur ruang juga masih dititikberatkan pada Pusat Kegiatan Wilayah yang ada di Kabupaten Sanggau.

Kajian lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana didalamnya mengamanatkan kewajiban untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RTRW Kabupaten. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten terhadap kondisi lingkungan hidup, termasuk di dalamnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program, serta rekomendasi-rekomendasi perbaikan pengambilan keputusan untuk menjamin pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pada dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, isu-isu strategis Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Perbaikan dalam Memberikan Jaminan;
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana;
3. Peningkatan Pengetahuan, Pelatihan dan Keterampilan Berbasis Digital Bagi Pelaku UMKM dan Generasi Muda;
4. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar;
5. Pelestarian Adat Budaya dan Lingkungan yang Bermartabat Peningkatan Kerukunan Beragama;
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kesejahteraan Dan Profesionalisme ASN;
7. Pembangunan Perbatasan Negara;
8. Pengoptimalan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Isu strategis daerah Provinsi dan Kabupaten merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Sanggau dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Sanggau antara lain telaahan terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2030 dan RPJPD kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045.

Bertitik tolak dari isu-isu strategis Kabupaten Sanggau dan identifikasi permasalahan berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa isu strategis yang mempengaruhi dan menjadi pedoman dalam perumusan isu strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, maka berikut terlampir tabel 2.9.

Tabel 2.9
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Sanggau	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Kualitas birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan sistem administrasi pemerintahan, reformasi birokrasi, dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau merupakan Perangkat Daerah yang diberi kewenangan di bidang keuangan dimana dalam melaksanakan fungsinya membutuhkan tujuan sebagai dasar pijakan untuk mencapai target kinerja. Melalui rumusan tujuan beserta indikatornya maka harapannya target kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat terukur dengan memenuhi unsur prospektif, realistis, akuntabel dan transparan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dalam mencapai Visi Kabupaten Sanggau yaitu **“Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan”**, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau melaksanakan Misi ke-5 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang Profesional”**.

Adapun tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang berpedoman pada sasaran Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan jangka panjang menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sebagai berikut

“Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah”.

3.2. Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan

yang terkait dengan indikator kinerja. Berpedoman pada sasaran Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 maka dirumuskan sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 seperti yang disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sanggau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatkan Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	70%	71%	72%	73%	74%	75%	
Meningkatnya kualitas layanan publik	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD	Nilai AKIP BPKAD	B	B	B	B	B	B	

3.3. Strategi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Strategi dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang selaras dengan strategi daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Akhir RPJMD. Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau ini menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Strategi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja, kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sanggau.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Sanggau yaitu “Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan”, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau melaksanakan Misi ke-5 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang Profesional”.

Strategi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dan tepat waktu,
2. Peningkatan ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah,
3. Peningkatan ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.
4. Penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas (SAKIP PD).

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Sedangkan Penahapan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 disajikan pada table 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan sarana, prasarana dan penggunaan aplikasi dalam ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Peningkatan kualitas sinergi dan koordinasi untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.	Fokus pada peningkatan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memerlukan perbaikan agar sesuai dengan sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.	Fokus pada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk menjamin pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan efektif dan efisien.	Fokus pada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk menjamin pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan efektif dan efisien.

3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 diperlukan rumusan arah kebijakan sebagai instrumen untuk menentukan program prioritas yang hendak diimplementasikan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang selaras dengan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau ini menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Rencana Strategis merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan Visi, Misi, dan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka rumusan arah kebijakan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dapat dilihat dalam Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Rencana Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1.		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang andal, efektif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dan tepat waktu,	
			Meningkatkan ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.	
2.		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah.	
3.		Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas standarisasi, sistem dan prosedur	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas (SAKIP PD).	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Untuk mewujudkan visi dan misi harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang ditetapkan mencakupi penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Program yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2025-2029 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau meliputi 3 (Tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.2. Uraian Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Kegiatan merupakan aspek operasional atau kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan BPKAD yaitu pijakan penyusunan Renja BPKAD pada Tahun 2030.

Adapun Subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.3. Uraian Subkegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sanggau

Sub kegiatan adalah bagian yang lebih spesifik dari suatu kegiatan. Sub kegiatan merinci langkah-langkah yang lebih detail, termasuk jenis-jenis belanja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Perangkat Daerah. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang urusan kewenangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Lebih jelasnya, indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sanggau yang akan menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan, mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, indikator kinerja. Selama lima tahun kedepan, BPKAD Kabupaten Sanggau akan menjalankan 3 Program, 13 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sasaran strategis disertai target indikator dan kerangka pendanaan disajikan pada table 4.1 dan table 4.2 berikut ini:

Tabel 4.1
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rencana Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Aet Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan pertanggung jawaban APBD tepat waktu	Indeks Reformasi Birokrasi		
					Opini BPK terhadap laporan keuangan		
					Persentase laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
						Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
						Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
						Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
						Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Persentase Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Meningkatnya ketertiban dan keteraturan administrasi dan penggunaan barang milik daerah	Persentase Aset Daerah yang sudah Terinventarisir secara baik	Penyusunan Standar Harga	
						Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	
						Pengamanan Barang Milik Daerah	
						Penilaian Barang Milik Daerah	
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas keuangan	Nilai AKIP BPKAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
						Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau Thun 2025-2029

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tujuan 1		Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)	WTP	100	100	WTP	100	WTP	100	WTP	100	WTP	100	
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	5.428.605.175	100	5.840.398.487	100	6.132.418.411	100	6.439.039.332	100	6.760.991.299	100	7.099.040.863	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	88.032.414	100	123.142.833	100	129.299.975	100	135.764.973	100	142.553.222	100	149.680.883	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	12.634.733	100	14.886.432	100	15.630.754	100	16.412.291	100	17.232.906	100	18.094.551	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	12.220.889	100	18.299.952	100	19.214.950	100	20.175.697	100	21.184.482	100	22.243.706	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	12.690.480	100	18.299.952	100	19.214.950	100	20.175.697	100	21.184.482	100	22.243.706	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun	12.467.352	100	18.406.575	100	19.326.904	100	20.293.249	100	21.307.911	100	22.373.307	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun	12.081.865	100	18.406.575	100	19.326.904	100	20.293.249	100	21.307.911	100	22.373.307	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	12.420.503	100	16.710.012	100	17.545.513	100	18.422.788	100	19.343.928	100	20.311.124	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	13.516.592	100	18.133.335	100	19.040.002	100	19.992.002	100	20.991.602	100	22.041.182	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	5.195.307.963	100	5.586.509.244	100	5.865.834.706	100	6.159.126.442	100	6.467.082.764	100	6.790.436.902	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/N0n PNS) yang disediakan	2.731.995.745	100	3.161.656.730	100	3.319.739.567	100	3.485.726.545	100	3.660.012.872	100	3.843.013.516	
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN	1.446.340.077	100	1.446.505.957	100	1.518.831.255	100	1.594.772.818	100	1.674.511.458	100	1.758.237.031	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP dan SPM yang diverifikasi	883.343.636	100	771.884.033	100	810.478.235	100	851.002.146	100	893.552.254	100	938.229.866	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	31.370.446	100	71.250.584	100	74.813.113	100	78.553.769	100	82.481.457	100	86.605.530	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan	69.219.476	100	47.710.787	100	50.096.326	100	52.601.143	100	55.231.200	100	57.992.760	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	33.038.583	100	87.501.153	100	91.876.211	100	96.470.021	100	101.293.522	100	106.358.198	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	145.264.798	100	130.746.410	100	137.283.731	100	144.147.917	100	151.355.313	100	158.923.079	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	16.686.103	100	18.984.537	100	19.933.764	100	20.930.452	100	21.976.975	100	23.075.823	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis Asuransi Barang Milik Daerah yang dibayarkan	57.104.566	100	48.874.475	100	51.318.199	100	53.884.109	100	56.578.314	100	59.407.230	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun dan dibukukan	71.474.129	100	62.887.398	100	66.031.768	100	69.333.356	100	72.800.024	100	76.440.025	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,60	100	70,70	WTP	70,80	WTP	70,90	WTP	71,00	WTP	70,10	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	275.587.158.790	100	259.913.085.409	100	272.908.739.679	100	286.554.176.663	100	300.881.885.497	100	315.925.979.771	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD dan perubahan APBD	1.363.505.847	100	1.872.337.067	100	1.965.953.920	100	2.064.251.616	100	2.167.464.197	100	2.275.837.407	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD yang disusun dan ditetapkan	89.453.288	100	82.487.358	100	86.611.726	100	90.942.312	100	95.489.428	100	100.263.899	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD yang disusun dan ditetapkan	86.910.415	100	82.283.418	100	86.397.589	100	90.717.468	100	95.253.342	100	100.016.009	
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun dan diverifikasi	61.540.546	100	107.921.598	100	113.317.678	100	118.983.562	100	124.932.740	100	131.179.377	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	31.151.980	100	46.813.626	100	49.154.307	100	51.612.023	100	54.192.624	100	56.902.255	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	32.783.680	100	46.813.626	100	49.154.307	100	51.612.023	100	54.192.624	100	56.902.255	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	529.174.695	100	938.535.327	100	985.462.093	100	1.034.735.198	100	1.086.471.958	100	1.140.795.556	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	532.491.243	100	506.659.614	100	531.992.595	100	558.592.224	100	586.521.836	100	615.847.927	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Produk Hukum Daerah	-	100	60.822.500	100	63.863.625	100	67.056.806	100	70.409.647	100	73.930.129	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Perbendaharaan Daerah	1.604.601.803	100	1.407.844.968	100	1.478.237.216	100	1.552.149.077	100	1.629.756.531	100	1.711.244.358	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Buku Kas Umum Penerimaan, Pengeluaran dan Buku Pajak	446.919.057	100	184.621.257	100	193.852.320	100	203.544.936	100	213.722.183	100	224.408.292	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD	150.236.017	100	194.881.517	100	204.625.593	100	214.856.872	100	225.599.716	100	236.879.702	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Transfer	300.135.100	100	401.660.974	100	421.744.023	100	442.831.224	100	464.972.785	100	488.221.424	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Daftar Gaji , Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Dokumen Daftar Pemungutan PPH Gaji dan Non Gaji, Taperum, IWP dan BPJS	444.088.065	100	493.924.660	100	518.620.893	100	544.551.938	100	571.779.535	100	600.368.511	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Rekonsiliasi	263.223.564	100	132.756.560	100	139.394.388	100	146.364.107	100	153.682.313	100	161.366.428	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan disusun	1.431.954.908	100	1.281.956.402	100	1.346.054.222	100	1.413.356.933	100	1.484.024.780	100	1.558.226.019	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen verifikasi transaksi harian	162.495.389	100	103.062.080	100	108.215.184	100	113.625.943	100	119.307.240	100	125.272.602	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan yang terverifikasi	140.425.094	100	119.357.684	100	125.325.568	100	131.591.847	100	138.171.439	100	145.080.011	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sanggau	182.699.251	100	140.008.691	100	147.009.126	100	154.359.582	100	162.077.561	100	170.181.439	
		Jumlah Laporan Keuangan Pemda yang disusun	553.065.453	100	337.548.744	100	354.426.181	100	372.147.490	100	390.754.865	100	410.292.608	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disusun dan ditetapkan	330.480.125	100	397.910.425	100	417.805.946	100	438.696.244	100	460.631.056	100	483.662.609	
	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Audited	30.621.324	100	87.751.784	100	92.139.373	100	96.746.342	100	101.583.659	100	106.662.842	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Jawaban Hasil Evaluasi Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD yang disusun	32.168.272	100	96.316.994	100	101.132.844	100	106.189.486	100	111.498.960	100	117.073.908	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Ketepatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah	271.187.096.232	100	255.350.946.972	100	268.118.494.321	100	281.524.419.037	100	295.600.639.988	100	310.380.671.988	
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Keputusan Bupati dan Laporan tentang penyertaan modal daerah	11.011.533	100	10.995.192	100	11.544.952	100	12.122.199	100	12.728.309	100	13.364.725	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan	255.149.855.184	100	248.766.872.258	100	261.205.215.871	100	274.265.476.664	100	287.978.750.498	100	302.377.688.023	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat	16.026.229.515	100	6.573.079.522	100	6.901.733.498	100	7.246.820.173	100	7.609.161.182	100	7.989.619.241	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah (%)	1.506.566.086	100	1.944.667.299	100	2.041.900.664	100	2.143.995.697	100	2.251.195.482	100	2.363.755.256	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang sudah Terinventarisir secara baik	1.506.566.086	100	1.944.667.299	100	2.041.900.664	100	2.143.995.697	100	2.251.195.482	100	2.363.755.256	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga yang disusun	100.973.561	100	130.430.286	100	136.951.800	100	143.799.390	100	150.989.360	100	158.538.828	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Survey Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun dan dibukukan	22.094.968	100	92.879.921	100	97.523.917	100	102.400.113	100	107.520.119	100	112.896.124	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun	82.034.668	100	167.762.023	100	176.150.124	100	184.957.630	100	194.205.512	100	203.915.787	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun	48.014.610	100	109.083.224	100	114.537.385	100	120.264.254	100	126.277.467	100	132.591.341	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun dan ditetapkan	505.849.793	100	225.645.776	100	236.928.065	100	248.774.468	100	261.213.191	100	274.273.851	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah yang disusun	154.626.996	100	108.199.796	100	113.609.786	100	119.290.275	100	125.254.789	100	131.517.528	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan pembuatan SPT dan dokumen terhadap pengawasan aset	121.550.699	100	265.071.488	100	278.325.062	100	292.241.316	100	306.853.381	100	322.196.050	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian Barang Milik Daerah	112.701.568	100	156.867.398	100	164.710.768	100	172.946.306	100	181.593.622	100	190.673.303	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	48.390.250	100	90.244.227	100	94.756.438	100	99.494.260	100	104.468.973	100	109.692.422	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen penghapusan dan Penjualan BMD	167.673.831	100	372.386.994	100	391.006.344	100	410.556.661	100	431.084.494	100	452.638.719	
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34.448.690	100	73.066.500	100	76.719.825	100	80.555.816	100	84.583.607	100	88.812.787	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah dalam Neraca	47.012.740	100	75.516.408	100	79.292.228	100	83.256.840	100	87.419.682	100	91.790.666	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan	61.193.712	100	77.513.258	100	81.388.921	100	85.458.367	100	89.731.285	100	94.217.850	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tujuan 2		Nilai SAKIP	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP BPKAD	1.458.436.231	100	2.594.378.978	100	2.724.097.927	100	2.860.302.823	100	3.003.317.964	100	3.153.483.863	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	59.440.500	100	65.197.341	100	68.457.208	100	71.880.068	100	75.474.072	100	79.247.775	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	59.440.500	100	59.150.223	100	62.107.734	100	65.213.121	100	68.473.777	100	71.897.466	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun	-	100	6.047.118	-	6.349.474	-	6.666.948	-	7.000.295	-	7.350.310	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum yang tersedia dengan baik	1.226.379.948	100	1.073.472.501	100	1.127.146.126	100	1.183.503.432	100	1.242.678.604	100	1.304.812.534	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik kantor yang disediakan	102.312.030	100	49.339.147	100	51.806.104	100	54.396.410	100	57.116.230	100	59.972.042	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan/ Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	-	100	321.626.790	100	337.708.130	100	354.593.536	100	372.323.213	100	390.939.373	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan/ Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	437.213.570	100	343.547.100	100	360.724.455	100	378.760.678	100	397.698.712	100	417.583.647	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	244.686.358	100	70.428.996	100	73.950.446	100	77.647.968	100	81.530.366	100	85.606.885	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	19.159.421	100	34.579.600	105	36.308.580	110	38.124.009	116	40.030.209	122	42.031.720	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke dalam daerah/ Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	322.456.000	100	134.796.000	44	141.535.800	62	148.612.590	80	156.043.220	98	163.845.380	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah sarana dan prasarana penatausahaan arsip yang disediakan	100.552.569	100	119.154.868	105	125.112.611	110	131.368.242	116	137.936.654	122	144.833.487	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	172.615.783	100	1.832.229.896	100	1.923.841.391	100	2.020.033.460	100	2.121.035.133	100	2.227.086.890	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	172.615.783	100	1.802.709.680	100	1.892.845.164	100	1.987.487.422	100	2.086.861.793	100	2.191.204.883	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur diadakan	-	100	29.520.216	100	30.996.227	100	32.546.038	100	34.173.340	100	35.882.007	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	894.829.731	100	784.362.088	100	823.580.192	100	864.759.202	100	907.997.162	100	953.397.020	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat	40.046.580	100	10.000.000	100	10.500.000	100	11.025.000	100	11.576.250	100	12.155.063	

Tujuan	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	661.368.333	100	472.317.720	100	495.933.606	100	520.730.286	100	546.766.801	100	574.105.141	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	193.414.818	100	302.044.368	100	317.146.586	100	333.003.916	100	349.654.112	100	367.136.817	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	550.218.737	100	865.366.178	100	908.634.487	100	954.066.211	100	1.001.769.522	100	1.051.857.998	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar perijinannya / Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	231.671.756	100	598.147.716	100	628.055.102	100	659.457.857	100	692.430.750	100	727.052.287	
		Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	139.122.381	100	108.593.842	100	114.023.534	100	119.724.711	100	125.710.946	100	131.996.494	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	179.424.600	100	158.624.620	100	166.555.851	100	174.883.644	100	183.627.826	100	192.809.217	

4.4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas BPKAD sebagaimana tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan program prioritas rencana jangka menengah yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD. Program prioritas tersebut selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 untuk dijabarkan ke dalam kegiatan. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan BPKAD Kabupaten Sanggau serta berpedoman pada program dan pendanaan indikatif dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau.

Adapun daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau yang ditangani Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau seperti disajikan pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota - Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		3. Pengelolaan Barang Milik Daerah - Penyusunan Standar Harga - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah - Penatausahaan Barang Milik Daerah - Inventarisasi Barang Milik Daerah - Pengamanan Barang Milik Daerah - Penilaian Barang Milik Daerah - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah - Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	

Berdasarkan table 4.3 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau memiliki 2 Program Prioritas dan 3 Kegiatan prioritas yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang Profesional. Melalui Program dan Kegiatan tersebut BPKAD Kabupaten Sanggau akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah.

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja BPKAD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPKAD periode 2025-2030 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah, memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau.

Berikut target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), disajikan pada table 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	
4	Nilai AKIP BPKAD	%	B	B	B	B	B	B	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK digunakan untuk menilai keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuannya. IKK digunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKK mencerminkan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Adapun target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030, disajikan pada table 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian / (WTP/Unqualified Opinion) Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion) Tidak Wajar (TW/ Adverse Opinion) Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer Opinion)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah realisasi APBD tahun berkenaan}}{\text{Total APBD tahun berkenaan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penetapan APBD	Batas waktu Penetapan APBD sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
4	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	$\frac{\text{Realisasi jumlah SILPA yang dianggarkan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
5	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana keuangan daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana}}{\text{Jumlah keseluruhan program dan kegiatan}} \times 100\%$	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	$\frac{\text{Jumlah alokasi belanja untuk bidang pendidikan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
7	Persentase belanja kesehatan (10%)	$\frac{\text{Jumlah alokasi belanja untuk bidang kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
8	Bagi hasil Kabupaten dan Desa	$\frac{\text{Jumlah anggaran penerimaan Dana Desa}}{\text{Total anggaran belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota kepada Desa}} \times 100\%$	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
9	Persentase aset tetap yang telah bersertifikat (%)		70%	70%	70%	70%	70%	70%	
10	Persentase usulan pemindahtanganan BMD yang diproses (%)	$\frac{\text{Jumlah usulan pemindahtanganan BMD yang diproses}}{\text{Jumlah usulan pemindahtanganan BMD}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Nilai AKIP BPKAD	Hasil Penilaian/Reviu TPI (Tim Penilai Internal) terhadap SAKIP PD	B	B	B	B	B	B	

Tabel 4.6
Indikator, Target Dan Rencana Pendanaan Program / Kegiatan / Subkegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2025 - 2030

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
	Nilai AKIP BPKAD	70,00	Poin	71,80	Poin	73,00	Poin	74,00	Poin	76,00	Poin	78,00	Poin	80,00	Poin	80,00	Poin
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Outcome: Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	18	Dok	18	Dok	18	Dok	18	Dok	18	Dok	18	Dok	18	Dok	18	Dok
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan
Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil:Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	74	Dok	74	Dok	74	Dok	74	Dok	74	Dok	74	Dok	74	Dok	74	Dok

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/N0n PNS) yang disediakan	36	Orang/ Bulan	36	Orang/ Bulan	36	Orang/ Bulan	36	Orang/ Bulan	36	Orang/ Bulan	36	Orang/ Bulan	36	Orang/ Bulan	36	Orang/ Bulan
Subkegiatan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen
Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP dan SPM yang diverifikasi	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang disusun	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen
Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil: Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	87	Dok	87	Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok
Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75	Paket	75	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket
Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	12	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil: Persentase pemenuhan layanan administrasi umum yang tersedia dengan baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
	Keluaran: Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	14.573	Dok	14.573	Dok	14.573	Dok	14.573	Dok	14.573	Dok	14.573	Dok	14.573	Dok	14.573	Dok
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket
Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket
Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan/ Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	14.240	Paket	14.240	Paket	14.240	Paket	14.240	Paket	14.240	Paket	14.240	Paket	14.240	Paket	14.240	Paket
Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barnag Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket
Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	300	Dokumen	300	Dokumen	300	Dokumen	300	Dokumen	300	Dokumen	300	Dokumen	300	Dokumen	300	Dokumen
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil: Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	22	Unit	22	Unit	32	Unit	32	Unit	32	Unit	32	Unit	32	Unit	32	Unit
Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit
Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	-	Unit	-	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil: Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil:Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	233	Unit	233	Unit	233	Unit	233	Unit	233	Unit	233	Unit	233	Unit	233	Unit
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75	Unit	75	Unit	75	Unit	75	Unit	75	Unit	75	Unit	75	Unit	75	Unit
Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	157	Unit	157	Unit	157	Unit	157	Unit	157	Unit	157	Unit	157	Unit	157	Unit
Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,00	Poin	71,80	Poin	73,00	Poin	74,00	Poin	76,00	Poin	78,00	Poin	80,00	Poin	80,00	Poin
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Outcome: Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (%) Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dan tepat waktu (%)	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Hasil: Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD dan perubahan APBD	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah Dokumen APBD dan APBDP	140	Dok	140	Dok	140	Dok	140	Dok	140	Dok	140	Dok	140	Dok	141	Dok
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD yang disusun dan ditetapkan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD yang disusun dan ditetapkan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun dan diverifikasi	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Hasil: Persentase Pemenuhan Layanan Perbendaharaan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah Dokumen Perbendaharaan Daerah	229	Dok	229	Dok	229	Dok	229	Dok	229	Dok	229	Dok	229	Dok	229	Dok
Subkegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	172	Dokumen	172	Dokumen	172	Dokumen	172	Dokumen	172	Dokumen	172	Dokumen	172	Dokumen	172	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	31	Dokumen	31	Dokumen	31	Dokumen	31	Dokumen	31	Dokumen	31	Dokumen	31	Dokumen	31	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoto ngan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoto ngan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen
	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)	70,00	Poin	71,80	Poin	73,00	Poin	74,00	Poin	76,00	Poin	78,00	Poin	80,00	Poin	80,00	Poin
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Hasil: Persentase dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan disusun	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	135	Dok	135	Dok	135	Dok	135	Dok	135	Dok	135	Dok	135	Dok	135	Dok

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
Subkegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan
Subkegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	58	Laporan	58	Laporan	58	Laporan	58	Laporan	58	Laporan	58	Laporan	58	Laporan	58	Laporan

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen
Subkegiatan Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen
Subkegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil: Tercapainya Ketepatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran:Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan
Subkegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan
Subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Outcome:Persentase pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah (%)	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Hasil: Persentase Penatausahaan Aset Daerah (tertib administrasi dan fisik)	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
	Keluaran: Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset	76	Dok	76	Dok	76	Dok	76	Dok	76	Dok	76	Dok	76	Dok	76	Dok
Subkegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
Subkegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan
Subkegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
Subkegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan
Subkegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan
Subkegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	49	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen	49	Dokumen
Subkegiatan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan
Subkegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN												AKHIR	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
Subkegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sanggau sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan BPKAD. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi jangka menengah daerah yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Kesimpulan dari Rencana Strategis ini mencakup beberapa hal penting:

1. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi pelayanan BPKAD;
3. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 memuat 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi Pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
4. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 merumuskan 3 program, 13 kegiatan, dan 65 sub kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, yaitu terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau;

5. BPKAD Kabupaten Sanggau menekankan pentingnya kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya, perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perencanaan Pembangunan partisipatif dengan berbasis data dan bukti.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah prinsip-prinsip, tata cara dan pedoman teknis yang menjadi dasar dalam menjalankan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau selama periode lima tahun. Kaidah ini menjamin agar pelaksanaan Rencana Strategis dapat berjalan sistematis, terukur, akuntabel dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Berikut Adalah kaidah pelaksanaan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029:

1. Dokumen Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh ASN BPKAD Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Turunan Rencana Strategis berupa Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025 hingga Tahun 2029 harus konsisten dengan tujuan, sasaran, indikator dan target yang ditetapkan. Terdapat tahun transisi 2030 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2030;
3. Alokasi pendanaan disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
4. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, ketercapaian kinerja dan perbaikan kebijakan dan perencanaan periode berikutnya;
5. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 bersifat dinamis dan dapat disesuaikan jika terdapat perubahan kebijakan nasional, kondisi darurat atau kebutuhan strategis lainnya. Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme revisi atau penajaman program dan kegiatan.